

**PENGARUH *LEVERAGE*, UKURAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PUBLIK TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016)**

Marizya Rukhma Safriana<sup>1</sup>, Komarudin Achmad<sup>2</sup>

**Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang  
Email: heyitsmarizya@gmail.com**

*Abstract*

*Mandatory disclosure is the required disclosure of financial statements by applicable accounting standards and the authorized institutions. Mandatory disclosure of financial statements can be influenced by several factors such as leverage, firm size, and public ownership. The purpose of this study is to provide empirical evidence about the influence of leverage, firm size, and public ownership on mandatory disclosure of financial statements. Samples in this research were taken with the purposive sampling method. Based on the criteria, 82 manufacturing companies listed in the Indonesia Stock Exchange in 2016 were selected as the research sample. The utilized data analysis technique was multiple linear regressions analysis. The result of this study showed that leverage, firm size, and public ownership have a positive effect on mandatory disclosure of financial statements.*

***Keywords: Leverage, Firm Size, Public Ownership, Mandatory Disclosure Level of Financial Statements.***

**Abstrak**

Pengungkapan wajib adalah pengungkapan informasi laporan keuangan yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku dan lembaga yang berwenang. Pengungkapan wajib laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti *leverage*, ukuran perusahaan dan kepemilikan saham publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan dan kepemilikan saham publik terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria, diperoleh sampel sebanyak 82 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage*, ukuran perusahaan dan kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan.

**Kata kunci: *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Saham Publik, Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan.**

## PENDAHULUAN

Pada era persaingan global yang semakin ketat saat ini, perusahaan menghadapi kondisi dimana pengungkapan informasi perusahaannya harus dilakukan dengan lebih transparan, terutama bagi perusahaan yang telah *go public*. Perusahaan menawarkan sahamnya di pasar modal untuk memperoleh modal demi kelangsungan usahanya. Dalam melakukan aktivitas di pasar modal, para investor maupun calon investor mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diterimanya. Sebelum melakukan investasi, investor akan menelaah terlebih dahulu laporan tahunan yang dimiliki suatu perusahaan untuk mengetahui keberlangsungan hidup perusahaan tersebut.

Laporan keuangan merupakan media utama dalam penyampaian informasi oleh manajemen kepada pihak-pihak eksternal. Agar pengguna laporan tidak salah menginterpretasi informasi yang didapatkan untuk pengambilan keputusan, maka perusahaan wajib melakukan pengungkapan (*disclosure*) atas data keuangan dan non keuangan dengan detail dan memadai. Pengungkapan (*disclosure*) didefinisikan sebagai penyediaan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian optimal pasar modal secara efisien. Pengungkapan merupakan langkah akhir dari siklus akuntansi yaitu pada tahap

pelaporan (*reporting*), dimana perusahaan menyajikan informasi dalam bentuk *statement-statement* keuangan.

Pengungkapan informasi laporan keuangan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum mengenai informasi yang harus diungkapkan oleh setiap perusahaan, yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku dan lembaga yang berwenang (Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Keuangan). Sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar item yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan bapepam, yang berarti perusahaan bebas memilih informasi yang akan diungkapkan. Namun, meskipun perusahaan bebas dalam memilih informasi, pihak perusahaan harus tetap menyampaikan informasi yang relevan untuk membantu pengambilan keputusan investasi. Perusahaan yang melakukan pengungkapan sukarela akan mendapatkan nilai tambah bagi investor.

*Leverage* menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. *Leverage* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib

laporan keuangan karena semakin tinggi nilai *leverage* maka perusahaan akan semakin komprehensif dalam mengungkapkan laporan keuangannya. Menurut Jensen dan Meckling dalam Nugroho (2012) menyatakan bahwa perusahaan dengan *leverage* yang tinggi menanggung biaya pengawasan (*monitoring cost*) yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, semakin tinggi rasio *leverage* maka penyajian informasi akan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan kreditur jangka panjang.

Ukuran perusahaan dipandang penting karena besarnya suatu ukuran perusahaan, maka “daya jual” sebuah perusahaan lebih membaik. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan. Menurut hipotesis biaya politik perusahaan besar menanggung biaya politik yang tinggi. Hal ini dikarenakan perusahaan besar menjadi pusat perhatian media dan konsumen dalam pasar modal. Untuk mengurangi biaya politik tersebut perusahaan akan melakukan pengungkapan laporan keuangannya dengan lebih komprehensif. Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki *public demand* akan informasi yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang berukuran lebih kecil. Perusahaan yang besar memiliki potensi untuk mengungkapkan informasi

lebih luas dan lebih lengkap daripada perusahaan yang berskala kecil.

Kepemilikan saham publik merupakan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki publik atau masyarakat umum. Perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan. Semakin banyak saham perusahaan yang dimiliki masyarakat, maka perusahaan akan lebih komprehensif dalam mengungkapkan laporan keuangannya. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, maka semakin detail pula pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut (Yulianti dalam Maharani dan Budiasih, 2016).

## **TELAAH PUSTAKA**

### **Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Teori agensi menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pemilik atau para pemegang saham (*principal*) yang mendelegasikan wewenang untuk pengambilan keputusan tertentu dalam perusahaan kepada pihak manajemen (*agent*) yang menjalankan perusahaan (Daniel, 2013). Teori ini mengemukakan bahwa teori keagenan erat kaitannya dengan hubungan antara prinsipal-agen yang membedakan antara pemilik dan manajemen, yang memisahkan antara perilaku, pembuatan keputusan dan fungsi

manajemen. Hubungan *principal-agent* dalam sebuah organisasi atau perusahaan dapat digambarkan sebagai hubungan antara pemilik atau para pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent*. Dalam hubungan ini, *principal* memberikan kewenangan dan otoritas kepada *agent* untuk menjalankan perusahaan demi kepentingan *principal* yang diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Pemilik (*principal*) akan mendelegasikan tanggungjawab kepada manajemen (*agent*) dan manajemen setuju untuk bertindak atas perintah atau wewenang yang diberikan pemilik. Dalam hubungan keagenan ini dapat terjadi konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen tersebut, karena *agency theory* memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari perbedaan informasi yang diperoleh antara pihak agen dan pihak prinsipal, atau yang biasa disebut dengan asimetri informasi.

Konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* disebut *agency problem*. Masalah agen biasanya terjadi antara manajer dan pemegang saham atau antara pemilik hutang dan pemegang saham (Sartono dikutip oleh Ristiana, 2012). Dalam upaya mengatasi atau mengurangi *agency problem* ini akan menimbulkan

biaya keagenan (*agency cost*). Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual cost*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku *agent*. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. *Residual cost* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal*. Untuk mengurangi biaya keagenan tersebut maka diperlukan alat kontrol yang dapat mengurangi risiko terjadinya asimetri informasi. Alat yang dapat digunakan *stakeholder* adalah laporan tahunan. Menurut Bernadi dkk. (dikutip oleh Achmad, 2017) laporan tahunan pada dasarnya merupakan sarana transparansi dan akuntabilitas manajer kepada pemilik modal dan dengan melakukan pengungkapan yang luas (*extent disclosure*), asimetri informasi antara manajer dan para pemilik modal dapat berkurang.

### **Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)**

Teori akuntansi positif dipelopori oleh Watts dan Zimmerman pada tahun 1960-

an. Menurut teori ini perusahaan bebas dalam memilih prosedur akuntansi yang digunakan untuk meminimumkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan. Perilaku manajemen laba dapat dijelaskan melalui Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*). Ada berbagai motivasi yang mendorong dilakukannya manajemen laba. Teori akuntansi positif mengusulkan tiga hipotesis motivasi manajemen laba yang dirumuskan Scott (2009) yaitu:

#### 1. *The Bonus Plan Hypothesis*

Dalam hipotesis ini diasumsikan apabila semua hal dalam keadaan tetap (*ceteris paribus*), maka manajer perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus kemungkinan akan memilih metode akuntansi yang dapat menggeser laba dari masa depan ke masa kini sehingga dapat menaikkan laba pada periode berjalan.

#### 2. *The Debt Covenant Hypothesis*

*Debt covenant hypothesis* berpendapat bahwa semakin tinggi utang atau ekuitas perusahaan yaitu sama dengan ketatnya perusahaan terhadap batasan-batasan yang terdapat dalam perjanjian utang dan semakin besar kesempatan atas pelanggaran perjanjian, maka semakin besar kemungkinan bahwa manajer menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan laba.

#### 3. *The Political Cost Hypothesis*

Dalam hipotesis ini dinyatakan bahwa semakin tinggi biaya politik suatu perusahaan, maka manajer cenderung akan memilih metode akuntansi yang dapat menanggihkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode masa mendatang, sehingga dapat mengurangi laba yang dilaporkan. Perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi dinilai akan menarik perhatian media dan konsumen yang nantinya juga dapat menarik perhatian pemerintah dan regulator sehingga menyebabkan timbulnya biaya politik, seperti munculnya intervensi pemerintah, pengenaan pajak yang lebih tinggi, dan berbagai macam tuntutan lain yang dapat meningkatkan biaya politik. Berdasarkan hipotesis biaya politik, perusahaan dengan ukuran besar akan cenderung lebih terbuka dalam mengungkapkan laporan keuangannya. Perusahaan besar menanggung biaya politik yang tinggi. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar akan menarik perhatian media dan konsumen yang kemudian akan menarik perhatian pemerintah dan regulator. Untuk mengurangi biaya politik tersebut perusahaan akan mengungkapkan laporan keuangannya dengan lebih luas.

#### **Pengungkapan Laporan Keuangan**

Pengungkapan dapat didefinisikan sebagai penyampaian informasi. Pengungkapan (*disclosure*) memiliki arti

tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan (*disclosure*) mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usah, sehingga laporan keuangan harus lengkap, jelas, dan dapat menggambarkan secara tepat keadaan-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut (Chariri dan Ghazali, 2003:235 dikutip oleh Ummah, 2017). Menurut Daniel (2013) ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan oleh regulasi yang berlaku, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Di Indonesia, peraturan mengenai pengungkapan laporan keuangan dikeluarkan oleh pemerintah melalui keputusan ketua BAPEPAM-LK (sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) No: Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012, tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Publik yang mensyaratkan elemen-elemen seharusnya wajib diungkapkan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia

harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yaitu pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan regulasi yang berlaku. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Meskipun perusahaan memiliki kebebasan dalam mengungkap informasi, pihak perusahaan tetap harus memberikan informasi yang dipandang relevan dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan.

### ***Leverage***

*Leverage* menunjukkan berapa banyak hutang yang digunakan untuk membiayai aset-aset perusahaan. Prastowo dan Juliaty mengungkapkan bahwa rasio *leverage* digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat risiko tak tertagihnya suatu utang. Jensen dan Meckling menyatakan bahwa perusahaan dengan *leverage* yang tinggi menanggung biaya pengawasan (*monitoring cost*) tinggi. Semakin tinggi tingkat *leverage* maka perusahaan akan semakin luas dan komprehensif dalam mengungkapkan laporan keuangan perusahaannya, hal tersebut dikarenakan

timbul biaya pengawasan yang tinggi (Daniel, 2013). Menurut Jansen dan Meckling teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi. Hal serupa juga diungkapkan oleh Na'im dan Rakhman (dikutip oleh Saputro, 2016) bahwa perusahaan dengan rasio hutang atas modal tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan keuangan untuk memenuhi debitor jangka panjang dibandingkan perusahaan dengan rasio rendah.

### **Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan dilihat dari seberapa besar perusahaan tersebut. Menurut Fitriani (dikutip oleh Nugroho, 2012) terdapat tiga alternatif yang digunakan untuk menghitung *size* perusahaan, yaitu total aset, penjualan bersih dan kapitalisasi pasar. Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 ukuran perusahaan diklasifikasikan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki *public demand* akan informasi yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang berukuran lebih kecil. Perusahaan besar cenderung lebih terbuka dalam mengungkapkan informasi

dalam laporan keuangannya dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan ukuran besar menanggung biaya politik yang tinggi. Perusahaan besar menjadi sorotan pihak media dan konsumen yang kemudian akan menarik perhatian pemerintah dan regulator. Semakin besar suatu perusahaan maka biaya politiknya akan semakin tinggi pula. Untuk mengurangi biaya politik tersebut perusahaan akan mengungkapkan laporan keuangannya dengan lebih luas.

### **Kepemilikan Saham Publik**

Kepemilikan saham dipengaruhi oleh penjualan saham yang dilakukan perusahaan dengan tujuan mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Maharani dan Budiasih (2016) mengungkapkan bahwa struktur kepemilikan saham perusahaan muncul akibat terdapat perbandingan jumlah pemilik saham dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seorang individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut (manajerial). Menurut Ainun dan Fuad (dikutip oleh Saputro, 2016) mengemukakan bahwa adanya perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki investor luar dapat mempengaruhi kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan karena semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, semakin banyak pula

detail-detail butir yang dituntut untuk dibuka dan dengan demikian pengungkapan perusahaan semakin luas. Hal tersebut sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, maka semakin detail pula pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

## **HIPOTESIS PENELITIAN**

### **Pengaruh *Leverage* terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan**

Teori agensi memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal yang seperti itu lebih tinggi (Jensen dan Meckling, 1976). Perusahaan dengan *leverage* tinggi memiliki risiko jangka panjang yang tinggi, sehingga perusahaan tersebut menanggung biaya pengawasan (*monitoring cost*) yang tinggi. Untuk mengurangi biaya agensi tersebut, perusahaan dapat melakukan pengungkapan laporan keuangannya dengan lebih komprehensif. Almilia dan Retrinasari (2007) dan Nugroho (2012) dalam penelitiannya membuktikan bahwa terdapat pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan laporan keuangan. Hal tersebut sejalan dengan teori yang telah dijelaskan oleh Jensen dan Meckling, dan

penelitian yang dilakukan Na'im dan Rakhman (2000) bahwa perusahaan dengan *leverage* yang tinggi akan mengungkap lebih banyak informasi dalam laporan keuangan daripada perusahaan dengan rasio yang rendah. Berdasarkan penjelasan teori dan temuan penelitian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: *Leverage* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan**

Perusahaan dengan ukuran besar menanggung biaya politik yang tinggi. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar menarik perhatian konsumen dan media yang kemudian akan menarik perhatian pemerintah dan regulator, sehingga menyebabkan terjadinya biaya politik. Oleh sebab itu perusahaan besar cenderung lebih luas dalam mengungkapkan laporan keuangannya dengan tujuan mengurangi biaya tersebut. Beberapa penelitian mendukung penjelasan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan tahunan perusahaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Daniel (2013), Andiani (2016), dan Achmad (2017). Berdasarkan penjelasan teori dan

temuan penelitian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan.

### **Pengaruh Kepemilikan Saham Publik terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan**

Kepemilikan saham publik muncul akibat terdapat perbedaan jumlah pemilik saham dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seorang individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut (manajerial). Teori Agensi menyatakan bahwa semakin banyak pihak yang memiliki saham perusahaan maka perusahaan akan semakin terbuka dalam melakukan pengungkapan laporan keuangannya. Penelitian yang dilakukan Achmad (2017) mengenai struktur kepemilikan saham publik yang diukur dengan presentase kepemilikan saham publik dengan jumlah saham yang beredar berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan tahunan. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Budiasih (2016), bahwa struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib laporan tahunan. Berdasarkan penjelasan teori dan temuan penelitian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Sampel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur dan menggunakan data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 82 perusahaan.

### **Sumber Data**

Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016, dan diakses melalui situs resmi BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### **Definisi Operasional**

#### **Variabel Dependen**

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan. Item yang tergolong dalam pengungkapan wajib adalah informasi yang terdapat dalam peraturan keputusan ketua BAPEPAM-LK (sekarang menjadi OJK) No: Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Publik sebanyak 1530 item. Tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan dapat diukur menggunakan

*index of disclosure methodology*, yaitu indeks Wallace (Nugroho, 2012:12). Indeks pengungkapan untuk setiap perusahaan sampel dapat diperoleh dengan cara berikut:

1. Memberi skor untuk setiap item pengungkapan, dimana jika suatu item diungkapkan diberi nilai satu dan jika tidak diungkapkan diberi nilai nol. Untuk item yang tidak harus diungkapkan perusahaan (*Not Available* atau N/A) tidak diberi nilai.
2. Skor yang diperoleh setiap perusahaan dijumlahkan untuk mendapat skor total.
3. Menghitung indeks kelengkapan pengungkapan dengan rumus: (Nugraheni, dikutip oleh Nugroho, 2012, hal. 12)

$$\text{MDFS} = \frac{n}{k} \times 100\%$$

Keterangan:

MDFS : indeks kelengkapan

pengungkapan laporan keuangan

n : jumlah item yang diungkapkan perusahaan.

k : jumlah item yang seharusnya diungkapkan.

### Variabel Independen

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah *leverage*, ukuran perusahaan dan kepemilikan saham publik.

1. *Leverage*

Rasio *leverage* dapat dihitung dengan mengukur proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas pemegang saham. Penelitian ini akan menggunakan *Debt to Equity ratio* (DER) perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel. Adapun rumus untuk menghitung DER adalah: (Panjaitan, 2015)

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Variabel *leverage* mengindikasikan data tidak terdistribusi normal, maka peneliti melakukan transformasi data dengan menggunakan *square root* (akar pangkat) dengan rumus:

$$\sqrt{\text{DER}}$$

2. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dihitung menggunakan nilai total aset. Rumus yang digunakan untuk menghitung ukuran perusahaan adalah: (Maharani dan Budiasih, 2016)

$$\text{SIZE} = \text{Ln Total Aset}$$

3. Kepemilikan Saham Publik

Kepemilikan saham publik adalah jumlah saham yang dimiliki oleh individu yang berada di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan pihak-pihak tersebut. Rumus untuk menghitung porsi kepemilikan saham publik adalah sebagai berikut: (Simanjuntak dan Widiastuti, dikutip oleh Saputro, 2016)

$$\text{POWN} = \frac{\text{Jumlah saham dimiliki masyarakat}}{\text{Total saham}} \times 100\%$$

Variabel kepemilikan saham publik mengindikasikan data tidak terdistribusi normal sehingga peneliti melakukan transformasi data dengan menggunakan *square root* (akar pangkat), dengan rumus:

$$\sqrt{\text{POWN}}$$

### Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model persamaan regresi linear berganda untuk menguji adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Namun sebelumnya diuji terlebih dahulu uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

### Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.2 diperoleh sebanyak 82 sampel untuk setiap variabel. Analisis deskriptif untuk variabel Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan (MDFS) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,2487 atau 24,87% dimiliki oleh PT. Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT). Nilai maksimum sebesar 0,6213 atau 62,3% dimiliki oleh PT. Astra International Tbk (ASII). Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,428190 atau 42,82% menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang diteliti pada periode 2016

masih kurang baik karena nilai rata-rata tersebut kurang dari 50%. Nilai standar deviasi dari variabel MDFS sebesar 0,0837720

Variabel *Leverage* yang diprosikan menggunakan *debt to equity ratio* (DER) memiliki nilai rata-rata sebesar 1,016729. Nilai *leverage* minimum sebesar 0,1092 dan nilai maksimum sebesar 5,4349. Standar deviasi variabel *leverage* (DER) adalah sebesar 0,9651472.

Variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) memiliki nilai minimum sebesar 25,2460 dan nilai maksimum sebesar 33,1990. Nilai rata-rata variabel ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 28,424805 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,5825330.

Analisis statistik deskriptif untuk variabel Kepemilikan Saham Publik (POWN) menunjukkan nilai minimum 0,0062 atau 0,62% lembar kepemilikan saham publik yang dimiliki oleh PT. Tunas Alfin Tbk (TALF), sedangkan nilai maksimum diperoleh sebesar 0,5196 atau 51,96% lembar kepemilikan saham publik dimiliki oleh PT. Ricky Putra Globalindo (RICY). Variabel kepemilikan saham publik memiliki nilai rata-rata sebesar 0,255120 dan standar deviasi sebesar 0,1464262.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah yang memiliki data berdistribusi normal. Untuk

menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan metode uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov Z* (1-sampel K-S). Berdasarkan tabel 4.3 Uji Normalitas menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 yaitu 0,924, dari hasil tersebut dapat diketahui jika data terdistribusi normal karena nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari 0,05.

## 2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Agar tidak terjadi multikolinearitas nilai *tolerance* harus > 0,10 dan nilai VIF harus < 10. Berdasarkan hasil pengujian asumsi Multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 yaitu *leverage* (DER) 0,986, ukuran perusahaan (SIZE) 0,948 dan kepemilikan saham publik (POWN) 0,936. Nilai VIF dari ketiga variabel independen menunjukkan nilai kurang dari 10 yaitu *leverage* 1,014, ukuran perusahaan 1,055 dan kepemilikan saham publik 1,069. Hal ini berarti bahwa model regresi berganda dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas, sehingga antar variabel independen tidak memiliki hubungan satu sama lain.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan uji *glejser* dan grafik *scatter plot*. Dalam melakukan uji ini jika nilai *sig.* > 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dan jika dalam grafik *scatter plot* tidak ada pola tertentu yang jelas, seperti titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka tidak ada gejala heteroskedastisitas. Dari hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser* pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa tiga variabel independen memiliki nilai *sig.* > 0,05 yaitu *leverage* 0,970, ukuran perusahaan 0,383 dan kepemilikan saham publik 0,794. Kemudian pada grafik *scatter plot* titik-titik tidak membentuk suatu pola tertentu dan menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, dapat disimpulkan bahwa asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

## 4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan uji metode Durbin-Watson. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa nilai Durbin-Watson adalah 0,609 berada antara -2 sampai dengan +2. Hal ini menunjukkan bahwa pada model regresi tidak terdapat autokorelasi.

## Hasil Pengujian Hipotesis

### Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil uji analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\text{MDFS} = -0,587 + (0,073)\text{DER} + (0,031)\text{SIZE} + (0,164)\text{POWN} + e$$

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koefisien konstanta sebesar -0,587 menunjukkan nilai negatif, sehingga apabila variabel DER, SIZE dan POWN bernilai konstan (tidak berubah atau sama dengan 0) maka nilai variabel tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan adalah sebesar -0,587.
2. Koefisien variabel *leverage* (DER) memiliki nilai sebesar 0,073 maka setiap kenaikan variabel *leverage* (DER) sebesar 1 poin, maka dapat meningkatkan nilai pengungkapan wajib laporan keuangan sebesar 0,073. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel *leverage* (DER) berpengaruh positif terhadap variabel tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan.
3. Koefisien variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai sebesar 0,031 maka setiap kenaikan variabel ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 1 poin, maka dapat meningkatkan nilai pengungkapan wajib laporan keuangan sebesar 0,031. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh positif terhadap variabel

tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan.

4. Koefisien variabel kepemilikan saham publik (POWN) memiliki nilai sebesar 0,164 maka setiap kenaikan variabel kepemilikan saham publik (POWN) sebesar 1 poin, maka dapat meningkatkan nilai pengungkapan wajib laporan keuangan sebesar 0,164. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel kepemilikan saham publik (POWN) berpengaruh positif terhadap variabel tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan.

#### **Uji Koefisien Determinasi**

Nilai koefisien determinasi berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar presentase variabel independen secara bersama-sama menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.9 menunjukkan nilai koefisien determinasi (*adjusted R square*) sebesar 0,310. Artinya komposisi variabel *leverage*, ukuran perusahaan dan kepemilikan saham publik memiliki pengaruh sebesar 31% terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan, sedangkan sisanya sebesar 67% (100% - 31%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### **Uji F (Uji Simultan)**

Berdasarkan pengujian diketahui bahwa *f*-hitung diperoleh sebesar 68,061, sementara hasil perhitungan untuk *f*-tabel

dihitung menggunakan rumus  $df1 = k$  dan  $df2 = n-k-1$ , dimana  $k$  adalah jumlah variabel independen dan  $n$  adalah jumlah sampel, maka  $df1 = 3$  dan  $df2 = 78$ . Dengan menggunakan perhitungan tersebut maka nilai  $f$ -tabel yang diperoleh adalah 2,72. Dapat diketahui bahwa nilai  $f$ -hitung sebesar 68,061 >  $f$ -tabel 2,72, dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < \alpha = 0,05$ . Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan.

#### **Uji T (Uji Parsial)**

Berdasarkan hasil olah data pengujian ini, maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial sebagai berikut:

##### **1. Variabel *Leverage* (DER)**

Pengujian pengaruh *leverage* (DER) terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan menghasilkan koefisien korelasi positif dan memiliki nilai signifikansi  $0,018 < 0,05$  maka *leverage* (DER) berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan.

##### **2. Variabel Ukuran Perusahaan (SIZE)**

Pengujian pengaruh ukuran perusahaan (SIZE) terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan menghasilkan koefisien korelasi positif dan memiliki nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  yang berarti ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh

terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan.

##### **3. Variabel Kepemilikan Saham Publik (POWN)**

Pengujian pengaruh kepemilikan saham publik (POWN) terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan menghasilkan koefisien korelasi positif dan memiliki nilai signifikansi  $0,039 < 0,05$  maka kepemilikan saham publik (POWN) berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan.

#### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan dan kepemilikan saham publik terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Pengaruh *Leverage* terhadap tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan**

Variabel *Leverage* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *leverage* perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Jensen dan Meckling dalam Nugroho (2012) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan *leverage* yang tinggi menanggung biaya pengawasan (*monitoring cost*) yang tinggi. Hal ini

disebabkan karena tingkat *leverage* yang tinggi berarti perusahaan memiliki risiko jangka panjang yang tinggi, sehingga timbul biaya pengawasan yang lebih tinggi (Jensen dan Meckling, 1976). Dengan melakukan pengungkapan laporan keuangan yang lebih luas diharapkan dapat mengurangi biaya pengawasan tersebut.

## 2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan

Variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan. Hal tersebut berarti bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin luas tingkat pengungkapan laporan keuangannya. Perusahaan yang besar cenderung lebih luas dalam mengungkapkan informasi dalam laporan keuangannya dibandingkan perusahaan yang berukuran kecil. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis biaya politik yang menjelaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka biaya politik perusahaan semakin tinggi. Biaya politik tersebut terjadi karena perusahaan besar menjadi sorotan media dan konsumen yang kemudian akan menarik perhatian pemerintah dan regulator. Dengan melakukan pengungkapan informasi laporan keuangan diharapkan dapat mengurangi biaya politik tersebut. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian

Suripto (1999) dan Meek et al. (1995) yang menyebutkan bahwa dalam penelitian-penelitian sebelumnya variabel ukuran perusahaan (*size*) adalah yang paling konsisten berpengaruh terhadap luas pengungkapan (Nugroho, 2012:21). Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Almilia dan Retrinasari (2007) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan.

## 3. Pengaruh Kepemilikan Saham Publik terhadap tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan

Variabel Kepemilikan Saham Publik (POWN) berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak saham perusahaan yang dimiliki oleh publik maka semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, semakin banyak pula butir-butir pengungkapan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh para investor. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Budiasih (2016) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan. Hasil yang sama dikemukakan oleh Nugroho (2012) yang mengungkapkan bahwa variabel saham publik berpengaruh

positif terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan teori agensi dalam Maharani dan Budiasih (2016) yang menyatakan bahwa semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, maka semakin detail pula pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi dan mendeteksi pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan dan kepemilikan saham publik terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan. Hasil ini menunjukkan perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi laporan keuangan. Hal tersebut sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa perusahaan dengan *leverage* yang tinggi menanggung biaya pengawasan (*monitoring cost*) yang tinggi. Dengan melakukan pengungkapan laporan keuangan yang lebih luas diharapkan dapat mengurangi biaya pengawasan tersebut.

Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib

laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin luas tingkat pengungkapan laporan keuangannya. Perusahaan besar menanggung biaya politik yang tinggi, dimana biaya politik ini timbul karena perusahaan besar menarik perhatian media dan konsumen yang nantinya akan menarik perhatian pemerintah dan regulator. Dengan melakukan pengungkapan laporan keuangan yang lebih luas maka perusahaan dapat mengurangi biaya tersebut.

Hasil yang sama diperoleh untuk variabel kepemilikan saham publik, yang menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah saham perusahaan dimiliki, semakin tinggi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangannya. Karena semakin besar tingkat kepemilikan saham oleh publik, semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, maka perusahaan akan semakin luas dalam mengungkapkan laporan keuangannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Achmad, Ajudia. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Struktur Kepemilikan dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Wajib Laporan

- Tahunan Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. *Final Assignment (Bachelor and Vocational Degree)*. Diakses dari <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/8528>
- Almilia, Luciana Spica dan Retrinasari, Ikka. (2007). Analisa pengaruh karakteristik perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. *Proceeding Seminar Nasional Inovasi dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Bisnis*. Diakses dari <https://spicaalmilia.files.wordpress.com/2008/08/penelitian-faktor-kelengkapan-pengungkapan.pdf>.
- Arif, Abubakar. (2006). Analisis pengaruh rasio *leverage*, rasio likuiditas, rasio profitabilitas, porsi saham publik, dan umur perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*, 1(2), 119-133.
- Daniel, Niko U. (2013). Pengaruh ukuran perusahaan, *leverage* dan likuiditas terhadap luas pengungkapan laporan keuangan (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Fitri, Y. (2012). Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Tahunan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Seminar Nasional Akuntansi XVI*.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, M., dan W. Meckling. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behaviour Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Finance Economics*, 3. Jogiyanto, HM, Prof. MBA, Akt., Ph.D. (2005). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Maharani, Luh G. P., dan I.G.A.N Budiasih. (2016). Pengaruh ukuran, umur perusahaan, struktur kepemilikan, dan profitabilitas pada pengungkapan wajib laporan tahunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(1), 34-52.

- Nugroho, Agus S. (2012). Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tingkat keluasan pengungkapan laporan keuangan pada sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1(12).
- Panjaitan, Yefta R. Y. (2015). Pengaruh manajemen laba, likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(2).
- Peraturan OJK Nomor VIII.G.7: Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. No. Kep-347/BL/2012. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Pradipta, F., Topowijono., D. Azizah. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Likuiditas Terhadap Luas Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya* 36(1).
- Putri, N.S., G. A Yuniarta., N. A. Darmawan. (2015). Pengaruh kinerja keuangan, proporsi kepemilikan, ukuran, dan status perusahaan terhadap luas pengungkapan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2009-2013. *E-Jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1).
- Ristiana, Novita. (2012). Pengaruh tingkat leverage, likuiditas, profitabilitas, saham publik dan umur perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *Skripsi*. Diakses dari <http://eprints.dinus.ac.id/8468/>.
- Saputro, Joko D. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* pada periode 2013-2015. *Skripsi*. Diakses dari <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/288/1/Joko%20Didik%20Saputro.pdf>
- Scott, William R. (2009). *Financial Accounting Theory*. Fifth Edition. Canada: Pearson.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,*

*Kualitatif dan R&D.* Bandung:  
Alfabeta.

Ummah, Dian. (2017). Pengaruh manajemen laba, likuiditas, leverage, dan profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset*

*Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu  
Ekonomi Indonesia (STIESIA)  
Surabaya, 6(6).*

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 20 Tahun 2008 tentang  
Usaha Mikro, Kecil, dan  
Menengah.